

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANTUAN PEMERINTAH DAN
PERKEMBANGAN KOPERASI ADAT DI DISTRIK MUARA TAMI
KOTA JAYAPURA**

Deasy Rosmina Kresna Kaaf¹

Risky Novan Ngutra²
qikinovan@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of government assistance and business capability on financial performance, as well as the differences in capital, turnover, and profit before and after government assistance in the Indigenous Cooperative of Muara Tami District. The study employed a quantitative approach using multiple linear regression and paired sample t-test methods on 38 cooperative members. The results showed that simultaneously, government assistance and business capability have a significant effect on financial performance. Partially, government assistance has no significant effect, while business capability has a positive and highly significant effect. The paired sample t-test results indicated significant differences between before and after assistance for capital, turnover, and profit. This study concludes that business capability is the dominant factor in improving the financial performance of indigenous cooperatives. The recommendation for the government is not only to provide physical assistance but also to strengthen human resource capacity through intensive training and sustainable mentoring, as well as to improve the mentoring ratio to be more ideal.

Keywords: government assistance, business capability, financial performance, indigenous cooperative

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen strategis yang dipilih pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan koperasi. Koperasi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Landasan kerja sama dalam koperasi didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban, di mana setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yang dihasilkan melalui rapat anggota. Koperasi di Kota Jayapura telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam memutar roda perekonomian. Data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kota Jayapura mencapai 130 unit dengan tingkat keaktifan sekitar 63 persen dan jumlah anggota sebanyak 21.243 orang. Pada tahun 2019, jumlah koperasi bertambah menjadi 221 unit dengan anggota 21.760 orang, meskipun koperasi yang aktif hanya 96 unit. Pada tahun 2022, jumlah koperasi meningkat menjadi 235 unit dengan tingkat keaktifan 44,7 persen dan koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan hanya 20 persen. Pada tahun 2023, jumlah koperasi mencapai 244 unit dengan penambahan 9 koperasi baru, tingkat keaktifan meningkat menjadi 40,16 persen, namun koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan masih stagnan di angka 19,7 persen. Dari sekian banyak koperasi yang tumbuh, salah satu yang paling menarik perhatian adalah munculnya koperasi adat.

Koperasi adat merupakan bentuk inovasi kelembagaan yang menggabungkan prinsip-prinsip perkoperasian modern dengan nilai-nilai dan aturan adat yang hidup dalam masyarakat setempat. Merujuk pada praktik Koperasi Adat di Banjar Tegalsari, Kota Denpasar, berbagai hal dalam operasional koperasi diatur berdasarkan anggaran dasar yang bersumber dari aturan adat. Wilayah keanggotaan, misalnya, hanya dibatasi pada masyarakat yang memang merupakan anggota kampung

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

adat di wilayah tempat koperasi tersebut berdiri. Demikian pula tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengawas serta pengurus dilakukan dengan tetap menjaga eksistensi adat sebagai benteng terhadap perubahan yang mungkin dapat merugikan koperasi. Di Kota Jayapura, Pemerintah Kota melalui penggunaan Dana Otonomi Khusus telah membangun sepuluh koperasi adat yang tersebar di sepuluh kampung adat, serta dua puluh koperasi lainnya yang didirikan di sekolah dan lokasi tempat ibadah. Untuk setiap koperasi adat, pemerintah memberikan bantuan berupa bangunan tempat pelayanan koperasi, modal usaha, belanja bahan sembako dan alat tulis kantor, serta belanja fasilitas perlengkapan koperasi dengan total anggaran per koperasi mencapai Rp318.808.000. Sedangkan untuk koperasi lainnya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp298.808.000 per koperasi dengan rincian yang hampir sama. Secara historis, pada tahun 2015 dibangun tujuh koperasi dengan anggaran Rp2.091.656.000, pada tahun 2016 juga tujuh koperasi dengan anggaran yang sama yaitu Rp2.091.656.000, pada tahun 2017 kembali tujuh koperasi dengan nilai yang sama Rp2.091.656.000, pada tahun 2018 dibangun dua koperasi dengan anggaran Rp607.616.000, pada tahun 2019 dibangun satu koperasi dengan anggaran Rp298.808.000, dan pada tahun 2020 diberikan bantuan modal untuk sepuluh koperasi adat masing-masing sebesar Rp10.000.000 sehingga totalnya mencapai Rp100.000.000, kemudian pada tahun 2019 bantuan modal diberikan untuk lima koperasi adat dengan total Rp50.000.000.

Secara teoritis, bantuan pemerintah dan kemampuan usaha seharusnya memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan koperasi. Artinya, semakin baik pelaksanaan bantuan pemerintah dan semakin tinggi kemampuan usaha suatu koperasi, maka akan semakin besar semangat kerja para anggota sehingga kinerja keuangan koperasi akan semakin baik di masa depan. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang sangat berbeda dan memprihatinkan. Koperasi bantuan pemerintah di Distrik Muara Tami mengalami berbagai kendala serius yang mengakibatkan kinerja keuangannya semakin menurun. Kendala paling mendasar adalah keterbatasan sumber daya manusia pengelola yang sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikan pengelola rata-rata hanya sampai pada jenjang sekolah menengah pertama, sebuah kondisi yang sangat tidak memadai untuk mengelola lembaga keuangan kelas koperasi yang membutuhkan pemahaman tentang pembukuan, manajemen keuangan, tata kelola organisasi, dan prinsip-prinsip perkoperasian. Ketua koperasi sendiri diketahui kurang memahami pembukuan dari transaksi pembelian secara baik, sehingga laporan keuangan tidak pernah tersusun secara akurat dan transparan. Lebih parah lagi, semenjak berdirinya koperasi adat tersebut, belum pernah sekali pun dilakukan rapat anggota koperasi untuk mengevaluasi perkembangan koperasi. Padahal rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menyelenggarakan rapat anggota menunjukkan bahwa pemahaman para pengurus dan anggota terhadap esensi koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan demokratis sangatlah rendah.

Selain itu, ditemukan pula masalah serius terkait integritas pengelolaan keuangan. Tidak adanya kejujuran dalam pengelolaan keuangan di antara anggota tim koperasi menjadi penyakit kronis yang menggerogoti koperasi dari dalam. Uang dan barang milik koperasi tidak dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga sulit untuk mengetahui sebenarnya berapa pemasukan dan pengeluaran yang terjadi. Hal ini diperparah dengan ketidakpahaman para pengurus dan anggota terhadap tujuan utama dari pendirian koperasi adat itu sendiri. Sebagian besar dari mereka mungkin melihat koperasi sekadar sebagai proyek bantuan pemerintah yang tidak perlu dikelola secara serius dan berkelanjutan. Faktor eksternal yang turut memperburuk kondisi adalah pendampingan dari Dinas Koperasi yang sangat kurang optimal. Seorang pendamping yang berlatar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang perkoperasian harus melayani sebanyak 15 koperasi dalam satu distrik. Dengan rasio yang sangat timpang tersebut, mustahil bagi pendamping untuk memberikan bimbingan teknis, pelatihan, monitoring, dan evaluasi yang memadai kepada setiap koperasi. Pendampingan yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dengan koperasi agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan justru menjadi formalitas belaka.

Ketimpangan antara teori dan realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban melalui penelitian empiris. Apakah bantuan pemerintah yang telah dikucurkan dengan nilai yang tidak sedikit benar-benar berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi adat? Ataukah faktor kemampuan usaha yang lebih menentukan kinerja keuangan? Atau mungkin ada faktor-faktor lain di luar kedua variabel tersebut yang justru lebih dominan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan koperasi adat? Di samping itu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi

modal, omzet, dan keuntungan koperasi sebelum dan sesudah menerima bantuan pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat krusial mengingat Dana Otonomi Khusus yang digunakan untuk membangun koperasi-koperasi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan hasilnya. Jika bantuan yang besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar, maka kebijakan ini perlu dievaluasi ulang secara mendasar. Lebih dari itu, keberadaan koperasi adat yang mengusung nilai-nilai lokal seharusnya menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan budaya yang adaptif terhadap konteks sosial masyarakat Papua. Namun jika dari awal fondasi pengelolaannya sudah rapuh karena lemahnya sumber daya manusia dan tata kelola, maka cita-cita luhur untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat melalui koperasi akan sulit terwujud. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna mengungkap secara mendalam persepsi masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan perkembangan koperasi adat di Distrik Muara Tami, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk perbaikan ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan studi kasus di Koperasi Adat Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh anggota koperasi yang berjumlah 38 orang, tersebar di tiga kampung adat yaitu Skouw Sae, Skouw Mabo, dan Skouw Yambe. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara dengan pedoman yang luwes menggunakan alat bantu perekam dan daftar pertanyaan, observasi pasif di tempat usaha anggota dengan dibantu pendamping, serta dokumentasi terhadap arsip dan dokumen terkait koperasi. Kuesioner yang dibagikan mencakup pertanyaan tentang bantuan pemerintah, kinerja anggota, perkembangan usaha, peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU), serta peningkatan omzet pendapatan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bentuk persamaan model :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Dimana X_1 adalah bantuan pemerintah, X_2 adalah kemampuan usaha, dan Y adalah kinerja keuangan koperasi adat. Selain model regresi, juga digunakan uji beda paired sample t-test untuk menganalisis perbedaan modal, omzet, dan keuntungan sebelum dan sesudah bantuan pemerintah. Selain itu, sebelum analisis, dilakukan uji validitas instrumen dengan kriteria $r > 0,3$ (Sugiyono, 2010) dan uji reliabilitas menggunakan rumus Alfa Cronbach. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal sebelum menggunakan uji parametrik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 38 responden yang merupakan seluruh anggota Koperasi Adat di Distrik Muara Tami yang tersebar di tiga kampung, yaitu Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Mabo, dan Kampung Skouw Yambe.

Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa anggota Koperasi Adat di Muara Tami didominasi perempuan (63,16%) dibanding laki-laki (36,84%). Hal ini mencerminkan peran aktif perempuan dalam ekonomi keluarga dan usaha mikro di perbatasan Papua. Namun, rendahnya partisipasi laki-laki berpotensi mempengaruhi efektivitas pengambilan keputusan strategis yang secara tradisional sering dipegang laki-laki dalam komunitas adat.

Sedangkan jika diamati berdasarkan kelompok umur, tergambar sebagian besar anggota berada pada usia produktif 18-45 tahun (81,58%), sementara lansia 46-60 tahun hanya 18,42%. Dominasi usia produktif merupakan modal baik untuk pengembangan koperasi karena energi dan adaptasi terhadap perubahan tinggi. Namun, rendahnya keterlibatan lansia dapat mengurangi kearifan lokal dan pengalaman tradisional yang penting bagi koperasi adat.

Tabel 1. Karakteristik Responden Koperasi Adat di Distrik Muara Tami

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
----	---------------	----------	----------------	----------------

1	Jenis Kelamin	Laki-laki	14	36,84
		Perempuan	24	63,16
		Total	38	100,00
2	Umur	Dewasa (18-45 Tahun)	31	81,58
		Lansia (46-60 Tahun)	7	18,42
		Total	38	100,00
3	Tingkat Pendidikan	SD	6	15,79
		SMP	21	55,26
		SMA	11	28,95
		Total	38	100,00
4	Pekerjaan (beberapa responden memiliki pekerjaan ganda)	Pengurus Koperasi	17	80,95
		Petani	14	66,67
		Swasta	7	33,33

Sumber : Hasil survey lapangan di olah (2024)

Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat sangat rendah, dengan dominasi tamatan SMP (55,26%), diikuti SMA (28,95%) dan SD (15,79%). Tidak ada responden dengan pendidikan diploma atau sarjana. Kondisi ini menjadi akar masalah rendahnya kinerja keuangan karena pengurus tidak mampu melakukan pembukuan, tidak paham manajemen koperasi, dan jarang mengadakan rapat anggota sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Terakhir menurut jenis pekerjaan, tampak sebagian besar anggota koperasi memiliki pekerjaan ganda. Pengurus koperasi (80,95%), petani (66,67%), dan swasta (33,33%). Pekerjaan ganda ini menyebabkan waktu dan perhatian terhadap pengelolaan koperasi terbagi, sehingga komitmen rendah, rapat anggota jarang diadakan, dan pengawasan keuangan lemah.

Secara keseluruhan, karakteristik anggota Koperasi Adat di Distrik Muara Tami menunjukkan potensi sekaligus tantangan yang sangat besar. Potensinya terletak pada dominasi perempuan yang ulet dan gigih, dominasi usia produktif yang energik, serta keberagaman latar belakang pekerjaan yang dapat memperkaya jejaring usaha. Namun, tantangan utamanya terletak pada tingkat pendidikan yang sangat rendah, yang menjadi penyebab langsung dari berbagai masalah manajerial seperti ketidakmampuan melakukan pembukuan, tidak pernah diadakannya rapat anggota, ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan, serta ketidakpahaman terhadap tujuan utama pendirian koperasi adat.

2. Hasil Analisis Berganda

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bantuan pemerintah (X_1) dan kemampuan usaha (X_2) terhadap kinerja keuangan Koperasi Adat di Distrik Muara Tami (Y). Berdasarkan tabel hasil uji regresi berganda yang disajikan dalam Tabel 2, diperoleh beberapa temuan penting yang akan diuraikan secara sistematis.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel / Parameter	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	2,452	2,528	0,970	0,339
Bantuan Pemerintah (X_1)	0,190	0,220	0,864	0,394
Kemampuan Usaha (X_2)	1,095	0,175	6,255	0,000
Multiple R	0,880			
R Square	0,774			
Adjusted R Square	0,761			
F-Stat	59,95			
p-value	0,000			

Sumber: Data diolah, 2024

Pertama, mengenai kekuatan hubungan dan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, nilai Multiple R sebesar 0,880 menunjukkan bahwa hubungan antara bantuan pemerintah dan kemampuan usaha secara simultan dengan kinerja keuangan koperasi adat tergolong sangat kuat dan bersifat positif. Artinya, semakin baik bantuan pemerintah yang diberikan dan semakin tinggi kemampuan usaha yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kinerja keuangan yang akan dicapai oleh koperasi. Nilai R Square sebesar 0,774 atau 77,4 persen mengindikasikan bahwa secara bersama-sama, kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan 77,4 persen variasi yang terjadi pada kinerja keuangan koperasi. Setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, nilai Adjusted R Square tercatat sebesar 0,761 atau 76,1 persen, yang berarti bahwa 76,1 persen variasi kinerja keuangan dijelaskan oleh bantuan pemerintah dan kemampuan usaha, sedangkan sisanya sebesar 23,9 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kondisi ekonomi makro, dukungan keluarga, akses pasar, kebijakan pemerintah lainnya, atau faktor sosial budaya masyarakat setempat.

Kedua, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 59,95 dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Nilai ini jauh di bawah batas signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel bantuan pemerintah dan kemampuan usaha berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Koperasi Adat di Distrik Muara Tami. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa kombinasi antara bantuan pemerintah yang memadai dan kemampuan usaha yang baik akan saling melengkapi dan bersinergi dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa bantuan pemerintah dan kemampuan usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan koperasi adat diterima.

Ketiga, persamaan regresi berganda yang dihasilkan adalah $Y = 2,452 + 0,190 X_1 + 1,095 X_2$. Nilai konstanta sebesar 2,452 berarti bahwa jika tidak ada bantuan pemerintah dan kemampuan usaha (X_1 dan X_2 bernilai nol), maka kinerja keuangan koperasi akan berada pada nilai 2,452. Koefisien regresi untuk variabel bantuan pemerintah (X_1) adalah 0,190 yang bertanda positif. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peningkatan bantuan pemerintah sebesar satu satuan akan diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan koperasi sebesar 0,190 satuan dengan asumsi variabel kemampuan usaha tetap atau konstan. Koefisien regresi untuk variabel kemampuan usaha (X_2) adalah 1,095 yang juga bertanda positif. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan koefisien bantuan pemerintah, yang berarti bahwa setiap peningkatan kemampuan usaha sebesar satu satuan akan meningkatkan kinerja keuangan koperasi sebesar 1,095 satuan dengan asumsi variabel bantuan pemerintah tetap atau konstan. Dengan demikian, secara numerik, kemampuan usaha memiliki pengaruh yang hampir enam kali lebih besar dibandingkan bantuan pemerintah terhadap peningkatan kinerja keuangan koperasi.

Keempat, hasil uji parsial (uji t) memberikan temuan yang sangat menarik dan penting untuk dianalisis lebih mendalam. Untuk variabel bantuan pemerintah (X_1), nilai t hitung yang diperoleh adalah 0,864 dengan p-value sebesar 0,394. Karena p-value (0,394) jauh lebih besar dari batas signifikansi 0,05, maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa bantuan pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Koperasi Adat di Distrik Muara Tami. Temuan ini terlihat kontradiktif dengan hasil uji simultan, namun sebenarnya justru memperkuat argumen bahwa bantuan pemerintah hanya akan efektif jika didukung oleh kemampuan usaha yang memadai. Dengan kata lain, bantuan pemerintah yang besar sekalipun tidak akan mampu meningkatkan kinerja keuangan jika sumber daya manusia pengelola koperasi tidak memiliki kemampuan usaha yang baik. Hal ini sangat konsisten dengan fenomena yang diuraikan sebelumnya, di mana koperasi adat di Distrik Muara Tami menerima bantuan yang cukup besar dari pemerintah melalui Dana Otonomi Khusus, namun kinerjanya justru menurun karena pengurus dan anggota koperasi memiliki tingkat pendidikan yang rendah (55,26 persen hanya tamat SMP dan 15,79 persen hanya tamat SD), tidak memahami pembukuan, tidak pernah mengadakan rapat anggota, serta tidak ada kejujuran dalam pengelolaan keuangan. Sebaliknya, untuk variabel kemampuan usaha (X_2), nilai t hitung yang diperoleh adalah 6,255 dengan p-value sebesar 0,000. Karena p-value (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa kemampuan usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Koperasi Adat di Distrik Muara Tami. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor kemampuan usaha yang mencakup aspek produksi, pemasaran, dan keuangan merupakan penentu utama keberhasilan atau kegagalan kinerja keuangan koperasi.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi berganda ini memberikan implikasi kebijakan yang sangat jelas. Pemerintah Kota Jayapura dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tidak boleh hanya berfokus pada pemberian bantuan fisik berupa bangunan, modal, sembako, dan fasilitas perlengkapan koperasi, karena bantuan tersebut terbukti secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Investasi yang jauh lebih penting dan mendesak adalah peningkatan kemampuan usaha sumber daya manusia pengelola koperasi melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan tentang manajemen koperasi, pembukuan sederhana, literasi keuangan, kewirausahaan, dan pemasaran. Selain itu, perbaikan kualitas pendampingan dengan menambah jumlah pendamping yang memiliki latar belakang pendidikan perkoperasian serta mengurangi rasio pendamping per koperasi dari yang semula satu pendamping untuk lima belas koperasi menjadi lebih ideal juga merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan demikian, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kemampuan usaha adalah variabel yang dominan dan paling menentukan dalam meningkatkan kinerja keuangan Koperasi Adat di Distrik Muara Tami.

3. Uji Beda Rata-Rata

Penelitian ini juga melakukan uji beda rata-rata menggunakan metode Paired Sample T-Test untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi modal, omzet, dan keuntungan Koperasi Adat di Distrik Muara Tami sebelum dan sesudah menerima bantuan pemerintah. Uji ini penting dilakukan karena dapat mengukur efektivitas intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan modal, bangunan tempat pelayanan koperasi, sembako, alat tulis kantor, serta fasilitas perlengkapan koperasi terhadap peningkatan kinerja usaha koperasi.

Tabel 3. Hasil Uji Beda Rata-Rata

		Mean	Paired Differences				t	Sig.
			Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
					Lower	Upper		
Pair 1	Modal sebelum ada bantuan	175.000	280.368	0.4548	344.688	528.997	9.605	0.000
	Modal sesudah ada bantuan	218.684						
Pair 2	Omset sebelum ada bantuan	140.263	268.617	0.4358	114.339	290.924	4.650	0.000
	Omset sesudah ada bantuan	160.526						
Pair 3	Keuntungan sebelum ada bantuan	175.789	281.684	0.4570	217.939	403.113	6.796	0.000
	Keuntungan sesudah ada bantuan	206.842						

Pertama, pada variabel modal, terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan setelah bantuan pemerintah disalurkan. Sebelum menerima bantuan, rata-rata modal yang dimiliki anggota koperasi hanya sebesar Rp175.000. Setelah bantuan diberikan, rata-rata modal tersebut meningkat menjadi Rp218.684, yang berarti terdapat tambahan modal rata-rata sebesar Rp43.684. Peningkatan ini secara statistik terbukti sangat signifikan, dengan nilai t hitung sebesar 9,605 dan nilai signifikansi 0,000 yang jauh di bawah batas alpha 0,05. Temuan ini mengonfirmasi bahwa bantuan pemerintah dalam bentuk modal usaha, bangunan tempat pelayanan koperasi, sembako, alat tulis kantor, serta fasilitas perlengkapan koperasi berhasil menambah pundi-pundi modal yang dapat digunakan anggota untuk mengembangkan usahanya.

Kedua, peningkatan modal yang terjadi ternyata berdampak langsung pada peningkatan omzet penjualan anggota koperasi. Sebelum adanya bantuan, rata-rata omzet yang dihasilkan anggota hanya sebesar Rp140.263 per periode. Setelah bantuan diberikan, rata-rata omzet meningkat menjadi

Rp160.526, atau naik sebesar Rp20.263. Uji statistik membuktikan bahwa peningkatan ini juga signifikan secara statistik, dengan nilai t hitung sebesar 4,650 dan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian, tambahan modal yang diperoleh anggota dari bantuan pemerintah tidak mengendap begitu saja, melainkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menghasilkan peningkatan volume penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah berhasil mendorong aktivitas ekonomi anggota koperasi di pasar.

Ketiga, peningkatan omzet yang terjadi pada akhirnya membawa dampak pada peningkatan keuntungan yang diterima oleh anggota koperasi. Sebelum adanya bantuan, rata-rata keuntungan yang diperoleh anggota adalah sebesar Rp175.789. Setelah bantuan pemerintah diberikan, rata-rata keuntungan tersebut meningkat menjadi Rp206.842, atau mengalami kenaikan sebesar Rp31.053. Uji statistik mengonfirmasi bahwa peningkatan keuntungan ini signifikan secara statistik, dengan nilai t hitung sebesar 6,796 dan nilai signifikansi 0,000. Dengan kata lain, bantuan pemerintah tidak hanya berhasil meningkatkan omzet, tetapi juga berhasil meningkatkan laba bersih yang dapat dinikmati anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun diinvestasikan kembali ke dalam usaha.

Apabila ketiga hasil uji ini disandingkan dan dianalisis secara berurutan, terlihat sebuah rantai dampak yang logis dan berkesinambungan. Bantuan pemerintah yang berupa injeksi modal menyebabkan peningkatan modal kerja anggota koperasi. Modal yang bertambah kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan baku yang lebih banyak, yang pada gilirannya meningkatkan omzet penjualan. Meningkatnya omzet, selama dikelola dengan efisiensi yang sama atau lebih baik, akan menghasilkan peningkatan keuntungan. Rantai positif ini terbukti secara statistik dalam penelitian ini. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa nilai t hitung tertinggi terjadi pada variabel modal (9,605), diikuti oleh keuntungan (6,796), dan terendah pada omzet (4,650). Urutan ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah memberikan dampak paling besar terhadap peningkatan modal, kemudian terhadap peningkatan keuntungan, dan yang paling kecil terhadap peningkatan omzet.

Meskipun secara statistik semua peningkatan terbukti signifikan, besaran peningkatan nominal yang terjadi masih tergolong kecil. Modal hanya naik Rp43.684, omzet naik Rp20.263, dan keuntungan naik Rp31.053. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa efektivitas bantuan pemerintah belum mencapai potensi optimalnya. Mengapa demikian? Jawabannya dapat ditemukan pada karakteristik responden dan temuan kualitatif dalam penelitian ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, rata-rata anggota koperasi hanya berpendidikan SMP (55,26 persen) dan SD (15,79 persen), dengan tidak ada satupun yang berpendidikan diploma atau sarjana. Kondisi ini menyebabkan pengurus koperasi tidak mampu melakukan pembukuan dengan benar, tidak memahami tujuan pendirian koperasi, serta tidak pernah mengadakan rapat anggota untuk evaluasi. Selain itu, pendampingan dari Dinas Koperasi juga sangat kurang optimal karena satu pendamping harus melayani 15 koperasi sekaligus. Akibatnya, meskipun bantuan modal telah diberikan, anggota koperasi belum mampu mengelolanya secara profesional untuk melipatgandakan omzet dan keuntungan secara maksimal.

Dengan demikian, kesimpulan akhir dari uji beda rata-rata ini adalah bahwa bantuan pemerintah memang efektif dan bermanfaat karena telah berhasil meningkatkan modal, omzet, dan keuntungan anggota Koperasi Adat di Distrik Muara Tami secara signifikan. Namun, efektivitas tersebut masih belum optimal karena berbagai kendala internal (rendahnya pendidikan dan kemampuan usaha anggota) dan eksternal (pendampingan yang kurang memadai). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak bantuan pemerintah di masa depan, program bantuan tidak boleh berhenti pada pemberian modal fisik semata, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, pendampingan berkualitas, dan pengawasan yang berkelanjutan.

3. Pembahasan

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama dengan kemampuan usaha), bantuan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mohamad Yufuf Ghulam (2021) serta Ismayadi dan Nada (2024) yang menyimpulkan bahwa bantuan pemerintah berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha dan kinerja keuangan UMKM. Namun demikian, secara parsial (sendirian), bantuan pemerintah ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia pengelola koperasi, di mana rata-rata pendidikan hanya tamat SMP (55,26 persen) dan SD (15,79 persen), ketua koperasi tidak memahami pembukuan, belum pernah diadakan rapat anggota, serta tidak ada kejujuran dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pendampingan dari Dinas Koperasi

juga kurang optimal karena satu pendamping harus melayani 15 koperasi sekaligus. Dengan demikian, bantuan pemerintah hanya akan efektif jika didukung oleh kemampuan usaha yang memadai.

Berbeda dengan bantuan pemerintah, kemampuan usaha terbukti berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara simultan maupun parsial. Koefisien regresi kemampuan usaha (1,095) hampir enam kali lebih besar dibandingkan koefisien bantuan pemerintah (0,190), yang berarti kemampuan usaha merupakan faktor yang jauh lebih dominan dalam menentukan kinerja keuangan koperasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ghulam (2021) yang menyatakan bahwa kemampuan usaha yang baik akan mendorong kinerja keuangan yang baik pula. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan usaha anggota koperasi adat masih sangat lemah karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman tentang manajemen koperasi, pembukuan, serta literasi keuangan. Penelitian Dhanti dkk. (2023) juga menegaskan bahwa kurangnya kreativitas dan manajemen yang baik menyebabkan bantuan pemerintah tidak berkembang sesuai rencana. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan usaha melalui pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama.

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji beda rata-rata terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah bantuan pemerintah untuk jumlah modal, omzet, dan keuntungan. Rata-rata modal meningkat dari Rp175.000 menjadi Rp218.684 (naik Rp43.684), omzet meningkat dari Rp140.263 menjadi Rp160.526 (naik Rp20.263), dan keuntungan meningkat dari Rp175.789 menjadi Rp206.842 (naik Rp31.053). Ketiga peningkatan ini signifikan secara statistik dengan nilai signifikansi 0,000. Temuan ini membuktikan bahwa bantuan pemerintah berhasil membawa perubahan positif, membentuk rantai dampak logis di mana peningkatan modal mendorong peningkatan omzet, yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan. Penelitian Perdana (2023) juga menemukan hal serupa bahwa bantuan modal dan pembinaan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku usaha mikro. Namun demikian, besaran peningkatan nominal yang terjadi masih tergolong kecil, mengindikasikan bahwa efektivitas bantuan belum optimal. Penyebab utamanya kembali pada lemahnya kemampuan usaha dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa bantuan pemerintah dan kemampuan usaha sama-sama penting dalam meningkatkan kinerja keuangan koperasi adat, namun kemampuan usaha memiliki peran yang jauh lebih dominan. Bantuan pemerintah terbukti efektif meningkatkan modal, omzet, dan keuntungan secara signifikan, tetapi peningkatannya belum optimal karena lemahnya SDM, minimnya pemahaman manajemen koperasi, tidak pernah diadakannya rapat anggota, ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan, serta pendampingan yang kurang memadai dari Dinas Koperasi. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang paling mendesak adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif, pendampingan berkualitas, dan perbaikan sistem pengawasan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, mengenai pengaruh bantuan pemerintah terhadap kinerja keuangan Koperasi Adat di Distrik Muara Tami, bantuan pemerintah memberikan pengaruh positif namun bersifat kondisional. Secara simultan (bersama-sama dengan kemampuan usaha), bantuan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial (sendirian) tidak berpengaruh signifikan. Artinya, bantuan pemerintah dalam bentuk bangunan tempat pelayanan koperasi, modal usaha, sembako, alat tulis kantor, serta fasilitas perlengkapan koperasi hanya akan efektif jika didukung oleh kemampuan usaha yang memadai dari pengurus dan anggota koperasi. Tanpa didukung kemampuan usaha yang baik, bantuan yang besar sekalipun tidak akan mampu meningkatkan kinerja keuangan secara optimal.

Kedua, kemampuan usaha berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara simultan maupun parsial. Koefisien regresi kemampuan usaha yang mencapai 1,095 jauh lebih besar dibandingkan koefisien bantuan pemerintah yang hanya 0,190, sehingga kemampuan usaha terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan kinerja keuangan koperasi. Kemampuan usaha yang meliputi aspek produksi, pemasaran, dan keuangan menjadi penentu

utama keberhasilan atau kegagalan koperasi adat. Semakin baik kemampuan usaha yang dimiliki oleh pengurus dan anggota koperasi, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang akan dicapai.

Ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara modal, omzet, dan keuntungan sebelum dan sesudah adanya bantuan pemerintah. Rata-rata modal meningkat dari Rp175.000 sebelum bantuan menjadi Rp218.684 setelah bantuan, rata-rata omzet meningkat dari Rp140.263 menjadi Rp160.526, dan rata-rata keuntungan meningkat dari Rp175.789 menjadi Rp206.842. Ketiga peningkatan ini terbukti signifikan secara statistik dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian, bantuan pemerintah terbukti membawa perubahan positif yang nyata terhadap kondisi usaha anggota koperasi, membentuk rantai dampak yang logis di mana peningkatan modal mendorong peningkatan omzet dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan.

2. Saran-Saran

Secara teoritis, penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan usaha memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan dibandingkan bantuan pemerintah terhadap kinerja keuangan koperasi adat. Temuan ini membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif dengan menambahkan variabel lain seperti gaya kepemimpinan, partisipasi anggota, akses teknologi, atau kondisi ekonomi makro, mengingat masih terdapat 23,9 persen faktor lain di luar model yang belum dijelaskan. Peneliti mendatang juga disarankan memperluas cakupan lokasi penelitian tidak hanya di Distrik Muara Tami tetapi juga di daerah lain di Papua, serta menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods untuk menggali lebih dalam fenomena sosial budaya yang melatarbelakangi rendahnya kemampuan usaha masyarakat adat dalam mengelola bantuan pemerintah.

Adapun secara praktis, berdasarkan temuan bahwa kemampuan usaha merupakan faktor paling dominan namun dalam realitasnya masih sangat lemah, saran yang paling mendesak adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan di bidang produksi, pemasaran, dan keuangan. Pemerintah Kota Jayapura juga perlu mengubah pola pemberian bantuan dari sekadar bantuan fisik menjadi bantuan bersyarat yang diawali dengan pelatihan, serta menerapkan sistem bantuan bertahap berdasarkan kinerja koperasi. Selain itu, Dinas Koperasi harus segera memperbaiki sistem pendampingan dengan menambah jumlah pendamping (rasio ideal satu pendamping untuk lima koperasi) dan memastikan pendamping memiliki latar belakang pendidikan perkoperasian. Terakhir, revitalisasi Rapat Anggota Tahunan sangat penting untuk dilakukan sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi tertinggi dalam organisasi koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P., dan Widiyanti, N. (2003). *Dinamika koperasi*. Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2016). *Pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta.
- Bagian Biro Perencanaan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM. (2009). Analisis kinerja koperasi 2004-2008. *Jurnal Modernisasi*, 5(3), 187.
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia (Edisi pertama)*. BPFE UGM.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya (Edisi kedua)*. Prenada Media Group.
- Dhanti, R., Panorama, M., dan Sumantri, R. 2023. Program Dana Bantuan Pemerintah terhadap UMKM Sektor Kuliner Pempek Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sains*, 12(1), 30-34.
- Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM RI. (2004). *Pedoman pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi*.
- Ghulam, M. Y. (2021). Pengaruh Bantuan Pemerintah Dan Kemampuan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 53-64.
- Ismayadi, I., dan Nada, S. (2024). Dampak Bantuan Pemerintah Binaan Dinas Koperasi UKM untuk Pengembangan Wirausaha Pemula. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 3(1), 20–24.

- Perdana, A. R. (2023) PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA PADANG OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT. Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Padang.
- Sagimun, M. D. (1985). Koperasi Indonesia. Inti Indayu Press.
- Sarief, S. (2004). Kebijakan untuk meningkatkan iklim yang kondusif dalam mengembangkan UMKMK sebagai kekuatan ekonomi.
- Sitio, A., dan Tamba, H. (2001). Koperasi: Teori dan praktik. Erlangga.
- Subandi, S. (2007). Kedudukan dan kiprah koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, (1).
- Sudarsono, dan Edilius. (2002). Koperasi dalam teori dan praktek. PT Rineka.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukamdiyo. (1996). Manajemen koperasi. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulaeman, S. (2004). Analisis manfaat lembaga keuangan berbentuk koperasi (KSP/USP). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2).
- Sumodiningrat, G. (2004). Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan.
- Sunyoto, D. (2012). Manajemen sumber daya manusia. Center for Academic Publishing Service.
- Tarigan, J. R., & Suparmoko, M. (2000). Metode pengumpulan data. BPFE Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (1995). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Sekretariat Negara.